

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA DALAM PERLINDUNGAN PREVENTIF HAK-HAK
MASYARAKAT ASLI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA**



**NAMA : DEBORA KETTY YEPESSE
NOMOR MAHASISWA: 135201983/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : DEBORA KETTY YEPESSE
Nomor Mahasiswa : 135201983/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Kewenangan Pemerintah Provinsi
Papua Dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak
Masyarakat Asli Papua berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua.

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.

24/10-15

Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum.

28/10-15



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : DEBORA KETTY YEPESSE
Nomor Mahasiswa : 135201983/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Kewenangan Pemerintah Provinsi
Papua Dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak
Masyarakat Asli Papua berdasarkan Undang
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua.

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.
(Ketua)

29/10-15

Dr. C. Woro Murdiati, SH., M.Hum.
(Anggota)

29/10-15

Y. Hartono, S.H., M.Hum.
(Anggota)

29/10-15

Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, S.H., M. Hum



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Debora KettyYepese

No. Mhs : 135201983

Alamat : Tambakbayan 4 No.20a, Kelurahan, Catur Tunggal,
Kecamatan, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini, dengan judul Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan karya asli penulis dan bukan hasil plagiat dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atama Jaya Yogyakarta maupun di perguruan lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali atas arahan Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulisan lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantum kandalam daftar pustaka.

Yogyakarta,.....,oktober 2015

Yang menyatakan

Debora Ketty Yepese

ABSTRAK

Peneitian yang berjudul Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ini difokuskan pada permasalahan implementasi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua, kendala-kendala dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua dan upaya penyelesaiannya, Penulis tertarik pada judul tersebut karena rasa heran dan prihatin pada perkembangan masyarakat asli Papua yang semakin terpuruk pada permasalahan hak-hak masyarakat asli Papua walaupun sudah adanya Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang secara khusus mengatur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kendala-kendala perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua dan upaya penyelesaian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya dari teori pembagian kekuasaan, desntralisasi asimetris, dan teori keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam perlindungan preventif hak-hak masyarakat asli Papua yang berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua belum terealisasi secara baik di dalam masyarakat asli Papua. Hal ini dapat terlihat dengan sebagian hak-hak masyarakat asli Papua belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan, walaupun secara khusus sudah adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menjadi landasan dalam setiap kewenangan yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Papua. akan tetapi kewenangan itu masih terbatas hanya pada tingkat Peraturan perundang-Undangan.

Kata Kunci : Implementasi, Kewenangan, Pemerintah Daerah, Perlindungan Preventif, Hak-hak Masyarakat Asli Papua.

ABSTRACT

The Authority Implementation of Provincial Government of Papua in Maintain the Rights Preventive of Papua Original Citizen study bases on Undang-Undang No. 21 in 2001 about special autonomy focused on authority implementation of Papua provincial government in maintaining rights preventive of Papua original citizen and completion efforts, the author interested in this topic because of dismay and concern at the development of indigenous Papuans although there has Undang-Undang No. 21 in 2001 about Special Autonomy that set specially.

The objectives of this study for reviewing and analyzing the authority implementation of Papua provincial government in in maintaining rights preventive of Papua original citizen bases on Undang-Undang No. 21 in 2001 about special autonomy for Papua, the obstacles of maintain the Papua original citizen's rights and the completion efforts. This study is normative use the legislation approaches, and studying from the power-sharing theory, asymmetric decentralization, and justice theory.

Kind of research that used in this thesis is normative law research, namely study that focused on positive norm law such legislation.

Result of this study conclude that the authority implementation of Papua provincial government in in maintaining rights preventive of Papua original citizen bases on Undang-Undang No. 21 in 2001 about special autonomy for Papua unrealized well in Papua original citizens. This can be seen by most of the rights of Papua original citizens have not been fully obtain of protection, although specially there is Undang-Undang No. 21 in 2001 about special autonomy for Papua which form the basis for any authority that is taken by local government of Papua. But the authority still limited to the level of legislation.

Key words: *Implementation, Authority, Local Government, Preventive maintain, Papua's Original citizens' rights*

KATA PENGANTAR

“ Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahaun Tetapi Orang

Bodoh Menghina Hikmat Dan Didikkan “

(Amsal 1:7)

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan rahmat dan kasih banyak kepada penulis, sehingga penelitian yang berjudul **Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua** dapat diselesaikan. Penelitian dengan topik tersebut menarik perhatian penulis karena prihatin pada perkembangan masyarakat asli Papua yang semakin terpuruk pada permasalahan hak-hak masyarakat asli Papua walaupun sudah adanya Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang secara khusus mengatur.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selesaiannya penelitian ini tidak semata-mata merupakan usaha penulis secara personal, tetapi terlebih atas bantuan beberapa pihak yang dengan caranya yang khas dan tulus turut membantu Penulis. Penulis menyampaikan limpah terimakasih kepada :

1. Allah Yang Maha kudus yang senantiasa memberikan Rahmat dan Kasih-nya sehingga dapat menjiwai penulis selama proses penelitian.
2. Pemimpin Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Parnawa P., MB., PhD. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing utama yang dengan segala keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pencerahan kepada penulis selama proses penelitian.
6. Ibu Dr. WoroMurdiati, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II (dua), yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan pemikiran, bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak Y. Hartono, S.H., M. Hum selaku dosen penguji, telah memberikan masukan, memperkaya dan mempertajam pemahaman Penulis mengenai penelitian ini.
8. Para Narasumber : Bapak Pdt. Hofni Simbiak S.Th selaku wakil 1 MRP, Bapak Abner Kehk S.H., M.Hum selaku kepala bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Bapak Ely Waroy

selaku Kepala Sub Bagian Legislatif Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

9. Bapak Paulus Somino selaku Wakil masyarakat di Jayapura.
10. Pengelola Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah membantu Penulis mendapatkan jasa pustaka sehingga memperkaya sumber kepustakaan dalam penelitian ini.
11. Seruruh Dosen pada Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membentuk wawasan keilmuan di bidang hukum bagi Penulis selama mengikuti perkuliahan.
12. Orang Tuaku Bapak Yohanis Yepese dan Merry. Lili. Yoku. Yang menjadi patokan dan inspirasi dalam berpacu.
13. Kakak, adik beserta sanak-saudara dan Keluarga besar Yepese/Yoku yang selalu membantu dalam segala kekurangan selama penelitian ini.
14. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan September 2013 Program Pasca sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung, menyemangati dan memberikan kontribusi yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.
15. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya penelitian ini.

Doa dan harapan penulis, kiranya semua bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan mendapat balasan dari Tuhan Yesus yang adalah Sumber Berkat.

Akhirnya, Penulis mengucapkan limpah terimakasih kepada segenap pembaca yang terkasih. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah sempurna dan masih membutuhkan ide-ide cermat dankritis untuk melengkapi dan membenahinya. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan kritis dan ide-ide cemerlang dari pembaca sekalian, guna memperdalam dan memperkaya isi tulisan ini. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Salam dan selamat membaca *God Bless All.....*

Penulis

Debora KettyYepese

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI -----	iii
PERNYATAAN KEASLIAN -----	iv
ABSTRAK -----	v
ABSTRACT -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	xi
DAFTAR TABEL -----	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	11
C. Batasan Masalah -----	12
D. Keaslian Penelitian -----	15
E. Manfaat Penelitian -----	24
1. Manfaat Teoretis -----	24
2. Manfaat Praktis-----	24

F. Tujuan Penelitian	25
-----------------------------	----

G. Landasan Teori	25
--------------------------	----

1. Teori Desentralisasi Asimetris	25
-----------------------------------	----

2. Teori Keadilan	28
-------------------	----

3. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	30
----------------------------------	----

H. Sistematika Penulisan	37
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah	39
---	----

B. Tinjauan Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua	41
--	----

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Asli	44
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
----------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian	47
---------------------------------	----

C. Data Penelitian	48
---------------------------	----

1. Bahan Hukum Primer	48
-----------------------	----

2. Bahan Hukum Sekunder	49
-------------------------	----

D. Metode Pengumpulan Data	49
-----------------------------------	----

E. Analisis Data	50
-------------------------	----

1. Bahan Hukum Primer	50
-----------------------	----

a. Deskripsi	50
--------------	----

b. Sistematisasi	50
------------------	----

c. Interpretasi Hukum	51
-----------------------	----

d. Menilai Hukum Positif -----	51
2. Bahan Hukum Sekunder -----	51
F. Proses Perpikir -----	52
G. Penarikan Kesimpulan -----	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua -----	54
1. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua -----	54
2. Representasi Kultural Orang Asli Papua -----	61
3. Penghormatan terhadap adat dan budaya -----	74
4. Pembedayaan perempuan -----	81
5. Pemantapan Kerukunan Hidup Beragama -----	87
B. Kendala-Kendala Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua Dan Upaya Penyelesaiannya -----	92
1. Kendala-Kendala Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua -	92
a. Kendala Dalam Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua -----	92
b. Kendala Dalam Representasi Kultural Orang Asli Papua -----	94
c. Kendala Dalam Penghormatan Terhadap Adat dan Budaya -----	97
d. Kendala Dalam Pemberdayaan Perempuan -----	100
e. Kendala Dalam Pemantapan Kerukunan Hidup Beragama -----	102

2. Upaya Penyelesaian Implementasi Kewenangan Pemerintah Provinsi

Papua Dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua 102

a. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Kewenangan Pemerintah Provinsi
Papua----- 102

b. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Representasi Kultural Orang Asli
Papua----- 105

c. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penghormatan Terhadap Adat dan
Budaya ----- 106

d. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemberdayaan Perempuan ----- 107

e. Upaya mengatasi Kendala Dalam Pemertapan Kerukunan Hidup
Beragama----- 109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ----- 104

B. Saran ----- 112

DAFTAR PUSTAKA